



**Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Perempuan Di Taiwan Melalui Program Safe And Fair
2018-2020**
*Optimizing the Protection of Female Indonesian Migrant
Workers in Taiwan Through the Safe and Fair Programme of
2018-2020*

**Melany Desi¹
M. Fathoni.²**

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang langkah pemerintah Indonesia melalui Program Safe and Fair dalam mengoptimalkan upaya melindungi pekerja migran Indonesia perempuan di Taiwan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Serta teknik pengumpulan data secara sekunder yang dapat diperoleh melalui data-data literatur seperti jurnal, surat kabar, buku-buku, dokumen, internet serta situs resmi yang tersedia yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis menggunakan teori Efektivitas Program dan Rezim Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya Program Safe and Fair, Indonesia dapat mengoptimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan didirikannya *Migrant Workers Resource Center* (MRC) dan layanan pendukung lainnya.

Kata kunci: pekerja migran, perempuan, Indonesia, program safe and fair.

Abstract:

This study discusses the steps taken by the Indonesian government through the Safe and Fair Program in optimizing efforts to protect female Indonesian migrant workers in Taiwan. This study uses a qualitative analysis approach. As well as secondary data collection techniques that can be obtained through literature data such as journals, newspapers, books, documents, internet and available official websites that can be used as references in this study. Furthermore, this study also analyzes using the

¹ Prodi Hubungan Internasional
Universitas Peradaban.
e-mail: melanidy7@gmail.com

² Prodi Hubungan Internasional
Universitas Peradaban
e-mail: hiirotoni@yahoo.com

Melany Desi, M Fathoni

theory of effectiveness of programs and international regimes. The result of this research is that with the Safe and Fair program, Indonesia can optimize the protection of Indonesian migrant workers by establishing a migrant workers resource center (MRC) and other supporting services.

***keyword:** migrant workers, female, Indonesian, safe and fair program.*

Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja internasional di kawasan ASEAN telah meningkat secara konsisten selama beberapa dekade terakhir, dengan hampir setengah dari 10 juta migran adalah perempuan (UN Women Asia and the Pasific, 2018). Berdasarkan pengamatan The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) dan International Labour Organization (ILO), pekerja migran perempuan di Asia Tenggara sangat rentan akan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Sebagian besar dari mereka bekerja dalam pekerjaan yang rentan, yakni pekerjaan dengan penghasilan dan produktivitas rendah, serta kondisi-kondisi yang sulit dan sering mengabaikan hak-hak dasar para pekerja migran (Rinaldy, 2019).

Indonesia menjadi salah satu sumber bagi ratusan ribu tenaga kerja yang mencari pekerjaan di luar negeri. Berdasarkan dari data yang berkembang dari tahun ke tahun, 78% pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara merupakan pekerja migran perempuan. Pekerja migran perempuan memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang penting bagi komunitas dan negara asal serta negara tujuan mereka. Oleh karena itu, migrasi tenaga kerja perempuan dapat menjadi sumber pemberdayaan yang penting bagi perempuan. Pekerja migran perempuan merupakan pahlawan devisa yang selama ini berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Pekerja migran perempuan Indonesia mayoritas bekerja pada sektor informal, terutama sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Namun, dalam setiap tahap proses migrasi, pekerja migran perempuan menghadapi risiko kekerasan, perdagangan manusia dan diskriminasi yang membatasi akses mereka terhadap perekrutan yang adil dan pekerjaan yang layak (asiapasific.unwomen.org). Mereka juga memiliki akses yang langka ke layanan perlindungan dan dukungan. Bagi pekerja

migran perempuan, termasuk penyintas kekerasan, sulit untuk menjangkau layanan perlindungan dan dukungan yang seringkali tidak terkoordinasi dengan baik antar lembaga, termasuk kepolisian, peradilan pidana, kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial.

Taiwan menjadi negara kedua yang dituju oleh para pekerja migran perempuan Indonesia selain negara Malaysia dan negara Asia lainnya. Penyebaran pekerja migran Indonesia di Taiwan memiliki jumlah cukup besar berkisar 1056.727 orang sejak tahun 2015-2018 (Utami, 2020). Angka yang cukup besar untuk menjadikan Taiwan negara tujuan utama para pekerja migran perempuan Indonesia. Hal tersebut didasarkan dengan alasan karena Taiwan memiliki upah yang tinggi dibanding dengan negara-negara Asia lainnya. Meski upah yang diberikan cukup tinggi, para pekerja migran perempuan Indonesia di Taiwan seringkali menghadapi berbagai permasalahan atau tindakan diskriminatif, seperti menjadi korban perdagangan orang, korban pelecehan dan kekerasan seksual, penganiayaan oleh majikan dan gaji yang tidak dibayar/tidak lunas.

Pada tahun 2018, melalui kemitraan ILO (International Labour Organization) dan UN Women (United Nations Women) bekerja sama dengan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) untuk membentuk sebuah program Safe and Fair untuk mewujudkan hak dan peluang pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN dan bagian dari Inisiatif Spotlight EU (European Union) dan UN (United Nations) untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Program Safe and Fair ini bertujuan untuk memastikan bahwa migrasi tenaga kerja aman dan adil bagi semua perempuan di kawasan ASEAN. Indonesia yang menjadi salah satu negara pelaksana program Safe and Fair ini diharapkan dapat melindungi perempuan pekerja migran yang rentan dari berbagai kekerasan melalui kerangka kebijakan migrasi ber-perspektif gender, dengan layanan yang

terkoordinasi dan berkualitas, serta pengetahuan hak dan pendataan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik (UN Women Asia and teh Pasific, 2018).

Kerangka Pemikiran

1. Teori Efektivitas Program

Menurut Junia (2010:26) seperti dikutip oleh Anis Dkk., efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat dalam melihat sasaran, sejauh mana sasaran program telah ditetapkan. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan efek, akibat, pengaruh, hasil dan tentu memberikan kepuasan terhadap masyarakat (Anis Dkk. 2021). Dalam mengukur tingkat efektivitas program, penulis menggunakan teori dari Sutrisno (2007: 125-126) yang dikutip oleh Anis Dkk. Sutrisno mengidentifikasi bahwa ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi melalui 5 tahap yaitu:

1) Pemahaman Program

Dalam penelitian ini, melihat bagaimana program Safe and Fair dapat membuat pihak yang terlibat mampu mengetahui tugas dan tanggungjawabnya serta masyarakat terutama para calon pekerja migran dan pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri mengetahui dan memahami maksud dari program Safe and Fair yang dilaksanakan. Dalam hal ini dibutuhkan peranan para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan program Safe and Fair melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai program Safe and Fair dapat tersampaikan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pihak pelaksana program Safe and Fair telah memahami tugas dan tanggungjawabnya, serta masyarakat juga telah memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai pekerja migran secara prosedural, seperti informasi yang telah disediakan oleh Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pemerintah yang

terintegrasi dengan Migrant Workers Resource Center (MRC) milik program Safe and Fair.

2) Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa program Safe and Fair dapat dikatakan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu mampu menjangkau para calon pekerja migran sampai ke desa-desa melalui integrasi LTSA dengan MRC, juga para pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri dengan memfasilitasi informasi terkait.

3) Tepat Waktu

Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pihak penyelenggara program Safe and Fair yakni ILO-UN Women dalam menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa program Safe and Fair belum sepenuhnya selesai karena jangka waktu program dari tahun 2018 sampai tahun 2022, yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa program Safe and Fair sampai saat ini masih berjalan.

4) Tercapainya tujuan

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana tujuan program Safe and Fair yang telah disepakati bersama dapat terealisasi dengan baik, dengan melihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan program Safe and Fair sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tujuan tersebut telah tercapai dengan baik maka dapat dikatakan efektif.

Dalam penelitian ini, program Safe and Fair sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia setiap melakukan berbagai kegiatan program dan juga mendirikan layanan MRC dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat terkait.

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata yang dimaksud melihat bahwa sejauh mana program Safe and Fair memberikan dampak atau perubahan nyata terhadap pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apakah pihak terkait dapat merasakan adanya perubahan atau dampak dengan adanya pelaksanaan program Safe and Fair.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa program Safe and Fair belum dikatakan efektif karena hanya mampu memberikan perubahan nyata kepada pihak yang berkolaborasi. Perubahan nyata yang dimaksud yaitu mampu memberikan perubahan keadaan, baik dari keadaan sulit menjadi menjadi keadaan yang lebih baik. Tetapi disisi lain perubahan tidak dapat dirasakan oleh sebagian pekerja migran yang masih mengalami berbagai permasalahan di luar negeri.

2. *Konsep Rezim Internasional*

Menurut Stephen Krasner (1982), mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana harapan semua para aktor bertemu pada suatu area tertentu hubungan internasional.

Konsep rezim internasional ini mengarah pada ILO dan UN Women yang menjalankan program Safe and Fair sebagai prinsip, norma dan aturan dalam mewujudkan hak dan peluang pekerja migran perempuan, serta untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di kawasan ASEAN. Prosedur yang dijalankan program Safe and Fair ini menggunakan 3 capaian program yaitu, suara dan agensi perempuan, pendekatan berbasis hak, dan keterlibatan luas pemangku kepentingan. Indonesia menerapkan program Safe and Fair ini karena

berlandaskan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ketentuan Undang-undang No. 18/2017 mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja di setiap fase siklus migrasi. Undang-Undang tersebut menjabarkan peran dan tanggung jawab pengemban tugas tingkat nasional dan sub-nasional dan meminta mereka untuk memperkuat pemberian layanan dan meningkatkan koordinasi, yang demikian sejalan dengan prosedur program *Safe and Fair*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dalam data-data yang didapat tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk angka, tabel, maupun semacamnya. Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sulit diungkapkan oleh penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif ini menekankan pada pencarian makna dibalik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga akan mendapatkan pemahaman yang mendalam akan realitas sosial yang akan tercapai.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tingkat analisa sistem internasional. Dimana unit analisa yang akan diteliti adalah tata kelola lembaga Program *Safe and Fair*, sedangkan unit eksplanasi pada penelitian ini adalah perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di Taiwan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder yang mana pengumpulan data dengan metode sekunder ini merupakan pengumpulan data yang tidak langsung sehingga data sekunder dapat diperoleh melalui data-data literatur seperti jurnal, surat

kabar, buku-buku, dokumen, internet serta situs resmi yang tersedia yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum

Menjadi pekerja migran tidak hanya membawa dampak positif, namun juga berpotensi membawa dampak negatif. Dampak negatif tersebut secara umum biasanya terjadi pada pekerja migran perempuan dibandingkan pekerja migran laki-laki. Para pekerja migran perempuan dengan kualifikasi pendidikan rendah dan low-skilled, pada umumnya bekerja di sektor domestik yang memiliki kerentanan tinggi akibat posisi tawar yang rendah (IOM, 2010).

Berdasarkan laporan BNP2TKI, lebih dari 70% pekerja migran merupakan pekerja migran perempuan dengan persentase yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan sebagian besar bekerja di sektor domestik. Menurut data BNP2TKI, pekerja migran perempuan berjumlah 695.775 dari total 1056.727 pekerja migran Indonesia pada periode tahun 2015-2018 (BNP2TKI, 2018). Indonesia merupakan salah satu penyumbang tenaga kerja asing terbesar di Taiwan. Menurut laporan pengolahan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI, 2018), pada periode tahun 2015-2018 penyebaran pekerja migran Indonesia di Taiwan memiliki jumlah terbesar kedua setelah Malaysia, data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan
Periode Tahun 2015-2018

No	Negara	2015	2016	2017	2018	Jumlah Total
1.	Malaysia	97.748	87.623	88.991	90.671	365.003
2.	Taiwan	75.304	77.087	62.823	72.373	287.587
3.	Hong Kong	15.322	14.434	69.182	73.917	172.855
4.	Singapura	20.895	17.700	13.379	18.324	70.298
5.	Arab Saudi	23.000	13.538	6.471	5.894	48.903

(sumber: BNP2TKI periode tahun 2015-2018)

Berdasarkan data di atas, dapat diartikan bahwa kondisi pekerja migran Indonesia tahun 2015-2018 banyak yang melakukan migrasi ke Malaysia, Taiwan dan Hong Kong untuk bekerja. Taiwan menjadi salah satu tempat tujuan utama pekerja migran Indonesia dibuktikan dengan angka penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan jumlah terbesar berkisar 287.587 pekerja migran Indonesia setelah Hong Kong dibandingkan dengan negara tujuan pekerja migran Indonesia lainnya.

B. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

Banyaknya minat dan antusiasme pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja di Taiwan ini memunculkan permasalahan baru. Permasalahan ini dapat muncul dari sektor domestik yang rawan terhadap pelanggaran hak pekerja migran karena termasuk dalam sektor tertutup, hanya hubungan antara majikan dan pekerja di dalam rumah. Situasi tersebut sangat rentan terhadap perlakuan buruk dan eksploitasi kerja bagi pekerja migran perempuan yang bekerja dalam sektor ini (Nazlatunnuha, 2022).

Adanya permasalahan pekerja migran ini membuat para pekerja migran melakukan pengaduan pelanggaran hak yang merugikan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan laporan BNP2TKI, ada sekitar 1610 jumlah pengaduan yang terkonfirmasi dan dilaporkan pekerja migran Indonesia di Taiwan dalam kurun waktu 2015-2018. Berikut adalah data jumlah pengaduan pekerja migran di Taiwan periode tahun 2015-2018:

Tabel 2.2
Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan
Periode Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Pengaduan
2015	274
2016	442
2017	622
2018	272
Total keseluruhan	1610

Sumber: laporan pengaduan BNP2TKI, 2018.

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaduan permasalahan pekerja migran Indonesia di Taiwan selama kurun waktu 2015 hingga 2018 berjumlah 1610 pengaduan. Di tahun 2017, jumlah pengaduan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Taiwan mengalami kenaikan, yang kemudian jumlah pengaduan menurun di tahun 2018. Meskipun begitu, jumlah pengaduan yang menurun tidak menghilangkan fakta bahwa permasalahan pekerja migran Indonesia di Taiwan masih tetap ada, terlebih yang menyangkut hak serta perlindungan para pekerja migran yang hingga kini dianggap belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah (Ndarujati, 2021).

Berdasarkan laporan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), terdapat 6 jenis permasalahan yang sering dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di Taiwan di sektor informal. Berikut adalah data dari jenis permasalahan pekerja migran tahun 2015 hingga 2018 berdasarkan statistik ketenagakerjaan KDEI Taipei:

Tabel 2.3
Jenis Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Berdasarkan Sektor Informal Tahun 2015-2018

No	Jenis Masalah	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1.	Gaji Tidak Lunas	131	86	262	61	540

2.	Pelecehan Seksual	17	29	31	20	97
3.	Kecelakaan Kerja	31	27	19	19	96
4.	Penganiayaan	15	37	19	19	90
5.	PMI Kaburan	13	24	22	13	72
6.	PMI Meninggal	72	52	48	56	228
Total Keseluruhan						1123

Sumber: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) 2015-2018.

Data diatas mencatat bahwa keenam permasalahan tersebut pada tahun 2015 hingga 2018 berjumlah 1123, dimana permasalahan yang paling banyak terjadi adalah gaji yang tidak lunas oleh majikan pada pekerja migran Indonesia di sektor informal. Dapat dilihat pada tabel diatas, di tahun 2017 permasalahan gaji yang tidak dibayar menjadi lebih tinggi mencapai 262 aduan dibandingkan pada tahun sebelumnya, dimana tahun 2016 permasalahan tersebut hanya berjumlah 86 aduan.

Permasalahan pekerja migran Indonesia memang sangat kompleks. Pekerja migran Indonesia seharusnya mendapatkan kondisi aman dan adil sebagai tenaga kerja. Hal tersebut seharusnya menempatkan pekerja migran dalam kondisi merasa tenang dan tidak selalu khawatir akan hal yang dapat mengancam dirinya seperti halnya tindakan diskriminasi, penganiayaan, pelecehan secara seksual, dan kecurangan dalam menerima hak upah. Perlindungan pekerja migran Indonesia ini membutuhkan upaya perlindungan dari berbagai aktor baik individu, negara yang jelas mempunyai peranan besar dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya, dan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan UN Women yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan di dunia.

C. Pembentukan Program Safe and Fair

Pada tahun 2018, International Labour Organization (ILO) dan UN Women membentuk program Safe and Fair: realizing women migrants worker rights and opportunities in the ASEAN region yang merupakan bagian dari Spotlight Initiative kerja sama antara Uni Eropa dan PBB sebagai upaya untuk mewujudkan hak dan peluang yang adil bagi pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN. Mengingat bahwa pekerja migran hampir setengah dari jumlah pekerja migran di ASEAN adalah pekerja migran perempuan. Program ini bertujuan untuk mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia, memperkuat pendekatan berbasis hak dan responsif gender terhadap kekerasan pada perempuan dan tata kelola migrasi tenaga kerja yang mendukung akses ke layanan penting (Ilo.org).

Kekerasan pada perempuan tidak lepas dari aspek migrasi, baik bermigrasi melalui jalur reguler maupun non-reguler, pekerja migran perempuan dapat menghadapi resiko kekerasan dan pelecehan secara seksual. Kekerasan dan perdagangan manusia yang seringkali menimpa perempuan pekerja migran merupakan bagian dari spektrum gender. Hal tersebut disebabkan dari norma dan budaya yang tidak ramah pada perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk akses migrasi reguler ke pekerjaan yang terampil, aman dan dibayar secara layak sesuai perjanjian kontrak (Ilo.org).

Dalam mencapai tujuannya, Program Safe and Fair memiliki 3 rencana capaian program, yaitu pertama dengan memperbaiki kerangka kerja migrasi pekerja migran untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dengan adanya tata kelola migrasi yang peka terhadap gender. Kedua, untuk memudahkan akses informasi dan layanan bagi pekerja migran dan mendapatkan kesempatan bagi mereka untuk berjejaring dengan membentuk

layanan yang terkoordinasi yang bermanfaat bagi pekerja migran perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia. Ketiga, adanya data tentang pengalaman pekerja migran perempuan serta dilakukan melalui kampanye kontribusi positif pekerja migran perempuan guna meningkatkan pemahaman dan sikap terkait hak dan kontribusi dari pekerja migran perempuan.

Permasalahan perlindungan perempuan pekerja migran memerlukan adanya perubahan norma dan budaya yang responsif gender dengan perbaikan tata kelola migrasi tenaga kerja demi tercapainya migrasi yang aman dan adil bagi semua perempuan di kawasan ASEAN sehingga dibentuknya program Safe and Fair yang dilaksanakan melalui kemitraan ILO dan UN Women dengan jangka waktu program dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Program Safe and Fair ini merupakan program global yang diimplementasikan oleh 10 negara di Asia Tenggara, seperti Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam.

Dibentuk pada tahun 2018, program Safe and Fair ini sudah diimplementasikan oleh beberapa negara di Asia Tenggara sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang bekerja di luar negeri. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Safe and Fair Filipina

Program Safe and Fair berfokus pada OFW perempuan yang mengalami kekerasan selama bekerja di luar negeri. Pada April 2022, program Safe and Fair mengadakan diskusi online dan bekerja sama dengan Edukasyon. ph. Kampanye tersebut berjudul “Ang Mama Kong BiyaHero” yang merupakan kampanye dengan melibatkan pemuda nasional dengan tujuan untuk mendidik pemuda dalam membantu mencegah kekerasan

terhadap perempuan, dan mengadvokasi kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan di dalam negeri maupun luar negeri.

2. Program Safe and Fair Kamboja

Melalui kolaborasi antara program Safe and Fair Kamboja, Saluran Bantuan Anak Kamboja (the Child Helpline Cambodia), dan pengembangan seluler inovatif InSTEDD iLab SEA, membuat aplikasi My Journey Mobile App yang sudah berlangsung selama dua tahun. Tujuan pembuatan aplikasi tersebut adalah untuk menghubungkan pekerja migran perempuan Kamboja dengan layanan dan informasi yang mereka butuhkan selama perjalanan mereka. My Journey Mobile App menyediakan akses ke informasi dan layanan penting, andal dan praktis yang tersedia di ponsel dan di mana saja. Layanan dan saluran bantuan di tiga belas negara berbeda dapat diakses dengan menekan sebuah tombol. Penekanan telah ditempatkan untuk memastikan aplikasi ramah pengguna dan dapat diakses secara universal. Informasi disampaikan melalui video, animasi, audio dan permainan peran, dengan konten yang dirancang untuk pengguna dari semua tingkat literasi (SpotlightInitiative, 2021).

3. Program Safe and Fair Myanmar

ILO dan UN Women melalui program Safe and Fair bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan (MOLIP) Kamboja, pada Agustus 2020 membuka Aung Lan Migrant Resource Center (MRC) dan Loi Kaw MRC pada 1 September 2020. Kedua MRC tersebut berlokasi di kantor Pertukaran Tenaga Kerja lokal MOLIP. Dengan dibukanya Migrant Resource Centre (MRC) Aung Lan dan Loi Kaw, dapat memastikan bahwa pekerja yang mencari pekerjaan di luar negeri dapat memperoleh informasi dan konseling terkini sebelum membuat keputusan tentang migrasi dan dapat mencari dukungan untuk mendapatkan perlindungan migrasi. Pekerja migran yang kembali ke Myanmar juga dapat memperoleh informasi

tentang peluang untuk pelatihan kejuruan, pekerjaan di Myanmar atau kemungkinan untuk bermigrasi kembali. Pekerja migran juga dapat mengajukan pengaduan jika terjadi eksploitasi atau kekerasan dan migran perempuan dapat menerima konseling dan rujukan sesuai kebutuhan (Ilo.org, 2020).

4. Program Safe and Fair Laos

Dengan pendanaan dari Uni Eropa, ILO bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Laos melalui Ship to Shore Rights South East Asia dan Program Safe and Fair meresmikan MRC (Migrant Resources Centre) di provinsi Bolikhamxay pada 2 Maret 2022. Kemitraan ini akan mendukung pemerintah Laos dalam memperluas dan meningkatkan aksesibilitas dan responsif gender dalam penyediaan layanan kepada pekerja migran perempuan dan laki-laki (Ilo.org, 2022).

MRC sebagai salah satu wujud nyata dari program Safe and Fair dalam upaya melindungi pekerja migran yang telah dibangun di negara-negara Asia Tenggara, tak terkecuali di Indonesia. Pada tahun 2021 dibawah Program Safe and Fair, MRC Indonesia didirikan di empat daerah, yaitu Blitar, Cirebon, Lampung dan Tulungagung. Adanya MRC di Indonesia ini merupakan kerja sama ILO-UN Women Safe and Fair dengan pemerintah, CSO (Civil Society Organization) dan serikat pekerja yang ada di Indonesia (Nazlatunnuha, 2022).

D. Implementasi dan Keberhasilan Program Safe and Fair dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Program Safe and Fair yang bergerak dengan membawa lensa gender dalam setiap langkah melindungi pekerja migran Indonesia perempuan telah berhasil mengadopsi dan menerapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ketentuan

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja di setiap fase siklus migrasi. Undang-Undang tersebut menjabarkan peran dan tanggung jawab pengemban tugas tingkat nasional dan sub-nasional dan meminta mereka untuk memperkuat pemberian layanan dan meningkatkan koordinasi. Program Safe and Fair memastikan operasionalisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 akan meningkatkan koordinasi di berbagai tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan utama dalam memberikan dukungan untuk perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran (Ilo.org, April 2020).

Keberhasilannya melibatkan para pemangku kepentingan di Indonesia dan juga menerapkan Undang-Undang No. 18/2017 yang meminta untuk memperkuat pemberian layanan dan meningkatkan koordinasi, ILO-UN Women melalui program Safe and Fair dapat mendirikan Pusat Sumber Daya Pekerja Migran atau Migrant Workers Resource Center (MRC) di Indonesia.

E. Migrant Workers Resource Center (MRC) di Indonesia

Pada tahun 2020, ILO-UN Women melalui program Safe and Fair bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Serikat Buruh Migran Indonesia serta Women Crisis Center Mawar Balqis telah membangun layanan non-administratif yang lebih responsif gender, yakni Migrant Workers Resource Centre (MR) yang diintegrasikan dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) milik pemerintah (Ilo.org, Juni 2021).

Berikut adalah 3 model integrasi Migrant Resource Centre dengan Layanan Terpadu Satu Atap sebagai berikut:

1) Memperkuat koordinasi antar

Pemerintah tingkat desa dan kabupaten dalam menyediakan layanan migrasi yang komprehensif dan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia selama perjalanan migrasi mereka.

2) Memperkuat kemitraan antara

Pemerintah, serikat pekerja migran dan pusat krisis perempuan.

3) Menyediakan *one stop center*

Perempuan dalam mengakses informasi dan layanan.

Program MRC terdiri dari serangkaian kegiatan seperti peningkatan pendataan, tata kelola migrasi tenaga kerja yang responsif gender di tingkat desa, peningkatan kapasitas pejabat pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi dan dialog sosial melalui pelaksanaan tripartit plus forum perlindungan pekerja migran di tingkat kabupaten dan kecamatan. Kegiatan lainnya meliputi upaya penguatan pusat informasi desa dan satuan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk dukungan terhadap program berbasis desa yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, seperti Desa Produktif Migran (Desmigratif), Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) dan lain sebagainya (Ilo.org, Juni 2021).

MRC-LTSA terpadu pertama kali diluncurkan di Kabupaten Cirebon sebagai daerah pengirim pekerja migran terbanyak di Indonesia. MRC Cirebon berada di daerah Kesenden Kecamatan Kejaksaan dalam lingkungan Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. MRC memberikan layanan yang menyeluruh dan responsif gender dengan jangkauan layanan sampai ke desa-desa. MRC melaksanakan penyediaan informasi otoritatif, konsultasi pra-kerja dan purna kerja, layanan psiko-sosial konseling, penanganan kasus dan layanan bantuan hukum, serta rangkaian pelatihan untuk calon pekerja migran Indonesia (Ilo.org, Juni 2021). Hingga kini Safe and Fair telah mendirikan MRC di 4 daerah pengirim pekerja migran terbesar, yaitu Cirebon, Blitar, Lampung dan Tulungagung.

F. Melibatkan Media Dalam Mempromosikan Migrasi Yang Peka Gender

Melalui Program Bersama ILO-UN Women Safe and Fair dibawah EU-UN Spotlight Initiative, bekerja sama dengan media Aliansi Jurnalis Indonesia

(AJI) Jakarta dan menyelenggarakan serangkaian program yang melibatkan media. Program-program tersebut merupakan bagian dari inisiatif komprehensif untuk mempromosikan migrasi yang aman dan adil bagi semua perempuan Indonesia yang berkontribusi pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan perdagangan manusia untuk kerja paksa (Ilo.org, Oktober 2021).

Media merupakan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang migrasi tenaga kerja, yang dapat memengaruhi kebijakan dan praktik. Cakupan migrasi tenaga kerja cenderung berfokus pada kasus-kasus terhadap migran dan seringkali tanpa disadari dapat menetapkan stereotip negatif tentang pekerja migran, terutama pada perempuan, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan pelecehan.

a. Program Pelatihan Jurnalisme

Melalui program kerja sama, program Safe and Fair dan AJI Jakarta mengumpulkan 25 jurnalis dari media online, cetak dan elektronik nasional dan regional untuk berpartisipasi dalam program pelatihan jurnalis selama tiga hari dengan tema “Memperkuat Lensa Gender dan Jurnalisme Etis Tentang Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan Terhadap Perempuan Buruh Migran”. Program pelatihan dibuka oleh Thibaut Portevin, Kepala Kerjasama Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam serta Direktur ILO di Indonesia, Michiko Miyamoto dan diselenggarakan pada tanggal 15-17 Oktober 2021 (Ilo.org, Oktober 2021).

b. Meluncurkan Glosarium Migrasi Ramah-Media

Untuk membantu media mengembangkan pelaporan yang bertanggung jawab dan etis terkait migrasi tenaga kerja dan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap pekerja migran, program Safe and Fair juga meluncurkan Glosarium Migrasi Ramah-Media versi bahasa Indonesia selama rapat redaksi dan pelatihan media. Glosarium berfungsi

sebagai panduan bagi para profesional media ketika menulis atau melaporkan tentang migrasi tenaga kerja perempuan atau kekerasan terhadap perempuan dalam konteks migrasi (Fairrecruitment.org, 2021).

Upaya Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia dibuktikan dengan mengesahkan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang didukung dan diterapkan oleh ILO-UN Women dalam program Safe and Fair. Berkat dukungan dan penerapan program Safe and Fair yang mengadopsi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia secara perlahan mulai berkurang. Berikut adalah data jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia di Taiwan dari tahun 2018 secara keseluruhan hingga tahun 2020 (BP2MI, 2020).

Tabel 4.2
Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan
Periode 2018-2020

Tahun	Jumlah Pengaduan
2018	238
2019	437
2020	176
Total keseluruhan	851

Sumber: Laporan Pengaduan BP2MI, 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pengaduan permasalahan khususnya di Taiwan pada tahun 2018-2020 kini terus menurun tiap tahunnya yakni berjumlah 851 pengaduan, yang kemudian dapat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada tahun 2015-2018 yang sudah dijelaskan pada bab 2 dimana jumlah pengaduan permasalahannya sebanyak 1610 aduan.

Berdasarkan laporan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), 6 jenis permasalahan yang sering dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di Taiwan di sektor informal juga dapat dibandingkan

dengan tahun 2015-2018 yang telah dijelaskan pada diatas. Berikut adalah data dari jenis permasalahan pekerja migran tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan statistik ketenagakerjaan KDEI Taipei:

Tabel 4.3
Jenis Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Berdasarkan Sektor Informal Tahun 2018-2020

No.	Jenis Masalah	2018	2019	2020	Jumlah Masalah
	Gaji Tidak Lunas	61	58	151	270
	Pelecehan Seksual	20	13	9	42
	Kecelakaan Kerja	19	17	19	55
	Penganiayaan	19	15	20	54
	PMI Kaburan	13	23	2	38
	PMI Meninggal	56	53	48	157
Total Keseluruhan					616

Sumber: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), 2020.

Berdasarkan Data diatas mencatat bahwa keenam permasalahan pekerja migran Indonesia di Taiwan pada tahun 2018-2020 berjumlah 616, dimana permasalahan yang paling banyak terjadi adalah gaji yang tidak lunas oleh majikan pada pekerja migran Indonesia di sektor informal. Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan data permasalahan pada tahun 2015-2018 yang sudah dijelaskan pada bab 2 yakni berjumlah 1123 total permasalahan yang paling sering terjadi. Pada tahun 2020 permasalahan gaji tidak lunas meningkat tinggi berjumlah 151 aduan yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia sehingga memberi dampak bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Meskipun begitu, hal ini membuktikan bahwa adanya program Safe and Fair serta keterlibatan pemangku kepentingan, organisasi buruh migran, masyarakat serta melibatkan media dalam mempromosikan migrasi tenaga kerja yang peka gender yang sedang berjalan dengan baik dapat menurunkan angka pengaduan pekerja migran Indonesia dari negara Taiwan di tahun 2018-2020.

Kesimpulan

Hasil dari pelaksanaan program Safe and Fair di Indonesia yaitu adanya layanan non-administrasi yang lebih responsif gender, yaitu Migrant Workers Resource Centre (MRC) yang terintegrasi dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) milik pemerintah. MRC memberikan layanan yang menyeluruh dan responsif gender dengan jangkauan layanan sampai ke desa-desa. MRC melaksanakan penyediaan informasi otoritatif, konsultasi pra-kerja dan purna kerja, layanan psiko-sosial konseling, penanganan kasus dan layanan bantuan hukum, serta rangkaian pelatihan untuk calon pekerja migran Indonesia.

Keberhasilan layanan MRC yang terintegrasi dengan LTSA ini dibuktikan dalam kategori praktik inovatif dan praktik baik karena merupakan model percontohan pertama di Indonesia yang masuk dalam Repository of Practice UN Network on Migration, dimana layanan dukungan kepada perempuan pekerja migran diberikan di bawah satu atap dan satu koordinasi bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan.

Peran ILO-UN Women melalui program Safe and Fair dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) terutama perempuan cukup efektif, dimana dapat menyediakan informasi otoritatif, konsultasi pra-kerja dan purna kerja, layanan psiko-sosial konseling, penanganan kasus dan layanan bantuan hukum, serta rangkaian pelatihan untuk calon pekerja migran Indonesia yang mudah diakses melalui Migrant Workers Resource

Center (MRC). Jumlah pengaduan permasalahan pun khususnya di Taiwan pada tahun 2018-2020 kini terus menurun tiap tahunnya yakni berjumlah 851 pengaduan, yang kemudian dapat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada tahun 2015-2018 dimana jumlah pengaduan permasalahannya sebanyak 1610 aduan. Hal ini membuktikan bahwa adanya program Safe and Fair serta keterlibatan pemangku kepentingan, organisasi buruh migran, masyarakat serta melibatkan media dalam mempromosikan migrasi tenaga kerja yang peka gender yang sedang berjalan dengan baik dapat menurunkan angka pengaduan pekerja migran Indonesia dari negara Taiwan.

Referensi

- Aeni, N. 2019. Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Perempuan. *Jurnal Litbang*. Vol. XV No. 2 Desember 2019 Hal 107-120.
- Anis, I., Usman, J., dan Arfah, S. R. 2021. Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh* Vol. 2, No. 3, Juni 2021.
- Khairunnisa, Z. 2020. Penyalahgunaan Asean Visa Exemption (Studi Kasus: Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Johor). *Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*. Hal. 3.
- Krasner, S. D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables*. International Organization, Vol. 36 No. 2. MIT Press.
- Ndarujati, D. 2021. Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan. *Jurnal Sosial Sains* 1 (1): 17–29.
- Utami, D. N. 2020. Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8: 848–60.

Nazlatunnuha, D. F. 2022. Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Skripsi Hubungan Internasional.

Rinaldy, T. K. 2019. Upaya UN Women Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Di Asia Tenggara. Skripsi Hubungan Internasional.

BNP2TKI. 2018. Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2018. Jakarta Selatan. Retrieved From:

https://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf
Diakses pada 27 September 2022.

BNP2TKI. 2019. Data Penempatan dan Perlindungan PMI. Jakarta. Retrieved From:

https://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan-Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf

BP2MI. 2021. Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2020. Jakarta. Retrived from:

https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020.pdf

ILO. 2022. Background Infromation Cambodia (January-March 2022). International Labour Organization. Retrieved from:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/--ro-bangkok-documents/genericdocument/wcms_735105.pdf Diakses pada 31 Agustus 2022.

ILO. 20 April 2020. Project Brief (2020): Indonesia Safe and Fair Project. Project Outline. Retrieved From Ilo.org:

https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_742619/lang-en/index.htm Diakses pada 3 September 2022.

ILO. September 2020. ILO, Through the EU Supported Safe and Fair Programme, Opens Two New Migrant Worker Resource Centres. Yangon. Press release. Retrieved from

https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_755043/lang-en/index.htm Diakses pada 31 Agustus 2022.

ILO. 10 Juni 2021. Safe and Fair Migration Through Migrant Workers Resource Center. Retrieved From Ilo.org:

https://www.ilo.org/jakarta/info/public/vid/WCMS_800623/lang--en/index.htm Diakses pada 5 September 2022.

ILO. 22 Oktober 2021. Media Engagement to Improve Gender-Sensitive labour Migraton Reporting. Retrieved From Fairrecruitment.org:

https://www.fairrecruitment.org/news/media-engagement-improve-gender-sensitive-labour-migration-reporting?language_content_entity=en Diakses pada 6 September 2022.

KDEI Taipei. 2020. Statistik Ketenagakerjaan KDEI Taipei. Retrieved From Simpati.kdei-taipei.org:

<https://simpati.kdei-taipei.org/v2/infografik#/simpati> Diakses Pada 16 September 2022.

Spotlight Initiative. 2021. A Mobile App Making Migration Safer for Cambodian Women. Spotligh Initiative. Retrieved from <https://spotlightinitiative.org/news/mobile-app-,aking-migration-safer-cambodian-women> Diakses pada 31 Agustus 2022.

UN Women Asia and the Pasific. 2018. Safe And Fair. 2018. Retrieved From:

<https://asiapasific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/safe-and-fair> Diakses pada 25 Januari 2022.

